

REKONSTRUKSI PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA

1) Ibnu Asqori Pohan, 2) Aylia Eka Krisdayanti, 3) Dakka Bangun
Simanjuntak

- 1) Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Politik Pemerintahan dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
- 2) Peneliti pada Social Research Center Malang (SRCM), Malang, Indonesia
- 3) Peneliti pada Social Research Center Malang (SRCM), Malang, Indonesia
inbuasqoripohan@ub.ac.id, ayliaekasrcm@gmail.com,
dakkabengunsrcm@gmail.com

Abstrak

Mohammad Hatta yang dikenal sebagai salah seorang ‘Dwi Tunggal’ Bapak Proklamator Republik Indonesia memiliki gagasan atau konsep perekonomian yang penting bagi Indonesia. Studi ini mencoba merekonstruksi kembali ide-ide ekonomi kerakyatan yang diformulasikan oleh Hatta. Studi ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Pendekatan kualitatif menjadi sangat relevan dalam konteks studi pemikiran. Kekuatan narasi yang terdapat pada studi ini mampu untuk menjelaskan rekonstruksi pemikiran ekonomi Hatta secara dalam. Studi ini menemukan dan menjelaskan bahwa munculnya istilah demokrasi ekonomi, ekonomi kerakyatan dan konsep koperasi yang kemudian disebut sebagai “Soko Guru” perekonomian rakyat dinilai menjadi solusi yang patut dan sesuai diterapkan di Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila. Gotongroyong yang merupakan intisari dari Pancasila menjadi ‘mesin utama’ dalam implementasi koperasi sebagai salah satu gagasan atas ekonomi kerakyatan yang dibangun.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Ekonomi Kerakyatan, dan Koperasi

Abstract

Mohammad Hatta who is known as one of the ‘Dwi Tunggal’ the Proklamator of the Republic of Indonesia has significant economic ideas or concepts for Indonesia. This study strives to reconstruct the notions of populist economy that was formulated by Hatta. This research uses a type of qualitative approach with descriptive exploratory methods. The qualitative approach becomes very relevant in the context of thought studies. The strength of the narrative contained in this study is able to explain the reconstruction of Hatta’s economic thinking in depth. The study found and explained that the emergence of the term economic democracy, people’s economy and the concept of cooperatives which were later referred to as “Soko Guru” people’s economy were considered to be appropriate and proper solutions applied in Indonesia based on Pancasila. Mutual cooperation which is the essence of Pancasila fits the ‘main engine’ in the implementation of cooperatives as one of the concepts for a populist economy that is built.

Keywords: Reconstruction, People Economics, and Cooperatives

Pendahuluan

Ide-ide ekonomi kerakyatan dan koperasi merupakan pandangan yang selalu dilekatkan pada sosok Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902¹ memiliki ketertarikan yang kuat terhadap ekonomi. Gagasan perekonomian yang hingga saat ini menjadi perbincangan (diskursus) para intelektual dan praktisi ekonomi adalah sebuah gagasan alternatif yang disebut oleh Hatta sebagai ekonomi kerakyatan.²

Pandangan-pandangan ekonomi Hatta sebagian besar merupakan *perlawanan* dan sekaligus kritik atas dominasi konsep-konsep ekonomi liberal yang dilihat dan dinilai oleh Hatta bukanlah solusi terbaik dan cenderung tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa. Dalam konteks mendistribusikan kembali/distribusi ulang asset, bentuk yang ideal bukanlah mendistribusikan asset, dan tidak juga membagi-bagikan perusahaan yang dalam status kolaps (bangkrut) atau yang hampir dinyatakan pailit, namun, tidak dapat juga dijadikan sebagai alat tawar-menawar untuk memperoleh hasil atau profit ekonomi lainnya yang lebih besar. Kecenderungan praktik yang mengalihkan dari pemain lama kepada pemain baru. Distribusi asset dalam pandangan Hatta merupakan upaya yang memberikan kekuasaan dan kesempatan yang adil bagi pihak manapun.³

Bung Hatta yang juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia telah berhasil memberikan sebuah penjelasan dan menawarkan bentuk konkrit ide ekonomi kerakyatan yakni melalui praktik perkoperasian. Koperasi dan usaha kecil menengah dinilai sebagai sebuah usaha perekonomian yang lebih dekat dengan jiwa dan semangat masyarakat Indonesia yaitu gotong-royong.

Dalam beberapa kali krisis ekonomi global yang juga menerpa Indonesia. Sebut saja misalnya krisis ekonomi dunia yang berkepanjangan pada tahun 1997 hingga 1999 dan terus berlanjut pada tahun 2001,

usaha kecil menengah atau disebut sebagai UKM, atau juga dalam istilah yang hampir sama dikenal sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah berhasil menjadi penyelamat perekonomian Indonesia.

Klaim tersebut paling tidak terbukti dari tertolungnya sektor pertanian rakyat dalam bidang produksi dan distribusinya. Selain itu UKM atau UMKM berhasil memberikan lapangan pekerjaan kepada para pekerjanya di tengah aksi korporasi besar yang dengan terpaksa guna efisiensi biaya produksi harus memberhentikan dan merumahkan para pekerjanya.

Apa yang telah terjadi tersebut, memberikan cukup alasan bagi para pemangku kepentingan khususnya pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan dan mengelola sektor usaha kecil dengan serius dalam berbagai bidang sehingga sektor ini menjadi harapan dan sekaligus tulang punggung yang dapat menopang perekonomian rakyat.⁴⁴

Koperasi berada pada tingkatan pengelolaan skala bisnis menengah bawah (UKM-UMKM) ini. Efektifitas koperasi dapat diidentifikasi pada kemampuannya mendekatkan dan memperpendek jarak produksi-distribusi-konsumsi, sehingga dengan demikian proses ekonomi menjadi lebih sehat dan rasional.

Begitu penting dan strategisnya ide pemikiran ekonomi kerakyatan yang dikemukakan oleh Bung Hatta, namun gagasan ekonomi kerakyatan ini pada praktiknya terlihat seperti tidak memiliki ruang dan tempat karena tergerus oleh arus perekonomian liberal yang dijalankan. Tulisan ini berusaha untuk merekonstruksi *puzzle* atau gambaran utuh dari ide atau gagasan perekonomian kerakyatan yang dimaksudkan oleh Bung Hatta. Sehingga diskursus atau wacana-wacana perekonomian kerakyatan terus hidup di dalam ruang publik dan akademik.

Celah kosong akademik (*academic gap*) yang ingin diisi oleh tulisan ini adalah memfokuskan pada ide ekonomi kerakyatan Hatta. Deliar Noer (2008) dan Panji Patra

(2008) pada masing-masing bukunya telah juga menyajikan perspektif studi yang sama melihat pemikiran ekonomi Hatta. Namun dalam tulisan ini, penulis secara spesifik ingin merekonstruksi gagasan ekonomi Hatta, lebih khusus lagi perihal ekonomi kerakyatan. Rekonstruksi dimulai dari latar belakang keluarga dan lingkungan dimana Hatta dibesarkan serta latar pendidikan dan organisasi yang penulis percayai memiliki kontribusi yang signifikan terhadap gagasan ekonomi kerakyatan dan koperasi yang diformulasikan Hatta.

Selain itu, secara kontemporer, gagasan ekonomi kerakyatan tersebut, penulis elaborasi dengan kondisi terkini usaha kecil menengah dan koperasi, ditengah-tengah arus kuat ekonomi liberal dengan dominasi kuat korporasi besar di Indonesia sebagai nilai tambah dan pembeda pada studi ini.

Keterbatasan tulisan ini adalah tidak menawarkan alternatif atau solusi perekonomian pengganti istilah ekonomi kerakyatan, namun tulisan ini berupaya menelusuri gagasan ekonomi Hatta menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini.

Metode

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-eksploratif. Maksud dari pendekatan ini adalah penyajian temuan data pustaka secara deskriptif yakni; menarasikan data tersebut secara sistematis, serta melakukan eksplorasi atau penelusuran yang lebih dalam terkait rumusan masalah dalam studi ini yakni, konstruksi berpikir ekonomi kerakyatan Hatta.

Kekuatan dari jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan ini terdapat pada kemampuan untuk menarasikan temuan-temuan yang didapati. Data yang dipelajari dan dianalisa pada penelitian ini adalah jenis data sekunder yakni melalui penelusuran buku-buku, dan atau dokumen baik yang tersedia secara *online* atau *offline*.

Teknik pengumpulan data tersebut merupakan teknik yang dikenal dalam studi kepustakaan.

Buku-buku yang menuliskan tentang biografi Bung Hatta menjadi sumber penting yang dicermati oleh penulis. Selain itu, secara khusus sumber tertulis lainnya yang membahas pemikiran Hatta mengenai ekonomi juga menjadi bahan utama dalam studi ini. Setelahnya peneliti kemudian mengkonstruksi dan mengeksplorasi pemikiran ekonomi Bung Hatta dan menganalisisnya dari latar belakang kehidupan, serta pendidikan Bung Hatta yang memberikan pengaruh atas terbentuknya proses, cara berpikir dan mengambil tindakan khususnya dalam bidang ekonomi.

Pembahasan

Tumbuh - kembangnya Muhammad Hatta

Muhammad Hatta lahir di Minang Kabau. Hatta, demikian panggilan yang biasa disematkan kepadanya, ia dilahirkan di Minang Kabau pada tanggal 12 agustus 1902. Minang Kabau merupakan daerah yang mudah dan cepat beradaptasi dengan kemajuan dan perkembangan zaman.⁵ Perubahan daerah Minang Kabau itu, menurut Christine Dobbin, terletak dalam dua bidang yaitu ekonomi dan agama dalam hal ini adalah Islam.⁶

Pada usia delapan bulan, Hatta telah menjadi seorang yatim. Ayahnya, H. Muhammad Djamil merupakan lahir dari keluarga agamis atau keluarga Syekh. Sedangkan ibunya, Siti Saleha berasal dari keluarga dengan latar belakang pengusaha. Hatta kecil dibesarkan dalam sistem keluarga dan budaya yang patrilineal dan dalam lingkungan para pedagang/pengusaha, apalagi setelah ibunya menikah lagi dengan seorang pengusaha yang berasal dari Palembang, H. Ning, maka tradisi wirausahawan dan perbincangan ekonomi

menjadi semakin kuat menambah khasanah berpikir Hatta kecil dalam bidang ekonomi.

Referensi dagang yang terdapat pada keluarga Hatta telah mempengaruhinya sangat kuat. Sejak kecil Hatta telah menjadi sosok yang disiplin di dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan pribadinya secara tertib.⁷ Khasanah intelektual Muhammad Hatta, semakin diperkuat dengan pengaruh Islam, adat, dan kolonialisme serta implikasinya yang menjadi karakter kuat bagi masyarakat Minang Kabau di awal abad ke-20.

Pendidikan Hatta dimulai di ELS (*Europese Lagere School*-sekolah dasar untuk orang-orang kulit putih) tahun 1913 di Padang. Setelah menyelesaikan sekolah dasarnya, kemudian ia melanjutkan studi tingkat pertamanya di MULO (*Meer Uitgebriede lager onder wejd*) tahun 1917. Selain bersekolah, Hatta setiap pagi hari juga tekun mengikuti pengajian di madrasah atau tempat-tempat mengaji di lingkungan tempat tinggalnya.

Aktifitas lainnya yang diikuti oleh Hatta selain dari kegiatan belajar di sekolah dan tempat mengaji. Ia juga tercatat aktif dalam JSB (*Jong Sumatranen Bond-Perkumpulan Pemuda Sumatra*). Dalam JSB, Hatta memulai karir keorganisasiannya ia dipercaya untuk berperan sebagai bendahara dan setahun kemudian merangkap sebagai sekertaris dan bendahara pada cabang Padang. Peran yang ia mainkan dinilai berkontribusi positif sebagai orang yang bisa dipercaya, baik dalam memegang urusan keuangan maupun memutar roda organisasi.

Selanjutnya Hatta mendapat kesempatan melanjutkan sekolah di PHS (*Prins Hendrik Handels School*) Jakarta pada tahun 1919 dan ia berhasil menyelesaikannya pada tahun 1921. Kesempatan ini dipergunakan Hatta untuk meningkatkan kemampuan diri dalam memahami seluk-beluk masyarakat jajahan dalam tingkat nasional. Akan tetapi pengalaman dan pergaulan berorganisasi yang ia dapatkan melalui JSB, begitu berkesan sehingga JSB menjadi pilihannya dalam proses

pengembangan dirinya. Melalui JSB, Hatta memiliki kesempatan yang besar untuk bertemu banyak orang terkemuka di Jakarta, khususnya mereka yang berasal dari Sumatra.

Hatta mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi ke Belanda pada tahun 1921. Di Belanda, Hatta bergabung dalam organisasi yang disebut sebagai *Indische Vereeniging* (atau dikenal sebagai Perhimpunan Hindia), kemudian pada tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi

Sejak masa Yunani kuno diskursus mengenai ekonomi telah dapat ditelusuri dari zaman Plato, Aristoteles, dan Xenophone. Setelahnya Kaum Skolastik mendominasi wacana, ide dan gagasan ekonomi, tidak berselang lama diskursus ekonomi beralih pada pandangan merkantilisme. Pada era pasca merkantilisme lahir sebuah perdebatan di ruang-ruang intelektual. Perdebatan tersebut mempersoalkan apakah merkantilisme dapat disebut sebagai sebuah aliran/mazhab ekonomi atau tidak. Para *scholars* terbagi ke dalam dua pandangan secara umum. Satu pihak menilai bahwa merkantilisme sebuah kebijaksanaan ekonomi sehingga dapat diklasifikasikan sebagai aliran berpikir ekonomi baru. Sedangkan pihak satunya lagi, menganggap bukan sebuah mazhab ekonomi.

Pada fase selanjutnya terdapat mazhab fisiokratis, kaum fisiokratis menganggap bahwa sumber kekayaan yang sesungguhnya adalah sumber daya alam.⁸ Pengaruh mazhab ini kemudian yang membius negara-negara yang berlimpah dan kaya akan sumber daya alamnya untuk acapkali mengandalkan kekayaan alam yang dimiliki sebagai alat tawar-menawar, terhadap produk-produk teknologi dari negara-negara penguasa dan pemilik teknologi. Sehingga kekayaan alam tersebut tidak jarang kemudian berubah menjadi

sebuah bencana dan perangkap ketergantungan kepada negara-negara pemilik teknologi yang umumnya adalah negara-negara yang disebut sebagai negara maju (*developed countries*).

Setelah era pemikiran fisiokratis muncul maka disusul kemudian oleh lahirnya pemikiran kapitalisme dan liberalisme yang dipelopori oleh Adam Smith. Lalu setelah kapitalisme seiring dengan itu, maka munculah sosialisme sebagai reaksi atas aliran kapitalisme tersebut. D. William dalam bukunya "*Dictionary of Philosophy and Religion, Eastern and Western Thought*" mengemukakan bahwa sosialisme merujuk kepada suatu persekutuan yang didirikan dan diatur dengan prinsip-prinsip kebersamaan dalam kepemilikan, baik yang menyangkut soal produksi dan distribusi untuk kesejahteraan umum.⁹ Sosialisme merupakan sebuah aksi atas dominasi pemikiran dan massif nya praktik eksploitasi kapitalisme diawal-awal kelahirannya.

Masa dimana terjadinya diskursus yang sengit dan tajam antara kapitalisme dan sosialisme, Hatta mengikuti dan menikmati dinamika *perang* ide dan gagasan antara para pendukung kedua kutub pemikiran tersebut. Dari luasnya spektrum dan cakrawala perdebatan kedua *mazhab* kapitalisme dan sosialisme, Hatta muda menjatuhkan pilihan idealisme pemikirannya kepada cara berpikir sosialisme.

Sesungguhnya Pemikiran sosialis Hatta lebih diilhami dan terinspirasi oleh ajaran Islam, dalam tulisannya Bung Hatta kerap kali mengelaborasi pemikiran ke-Islamannya dengan pemikiran sosialisnya. Ini terbaca di dalam bukunya yang berjudul "*Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*"¹⁰. Gagasan mengenai *demokrasi ekonomi*, dimana kekayaan suatu negeri yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, tambang tidak dikuasai oleh orang-perorangan atau golongan tertentu, tetapi dalam masalah ini rakyat pun mempunyai hak untuk turut serta menikmati kekayaan alam yang ada di

negeri ini melalui penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut.¹¹

Selanjutnya pemikiran ekonomi Muhammad Hatta yang juga terbilang fenomenal adalah membangkitkan ekonomi rakyat, seperti petani, nelayan, pedagang-pedagang kecil melalui jalan koperasi.¹² Kedua gagasan Hatta tersebut mencoba mempertajam konsep demokrasi ekonomi yang ditawarkan dan dimaksudkannya di dalam forum-forum pergaulannya secara nasional dan internasional.

Telah disinggung pada paragraf sebelumnya perihal apa yang dimaksud sebagai demokrasi ekonomi secara umum oleh Hatta. Secara epistemologis, demokrasi ekonomi berasal dari dua pemaknaan kata yakni demokrasi dan ekonomi. Sederhananya demokrasi kita ketahui berasal dari kata *demos* dan *cratos* yang bermakna pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat. Sedangkan ekonomi dalam makna yang paling sederhana adalah sebuah *concern* keilmuan yang meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Pengaturan ketiga elemen tersebut merupakan ranah perbincangan dan keilmuan ekonomi.

Namun, mengarah pada pemaknaan yang lebih mendalam demokrasi ekonomi memiliki sebuah pemahaman yang lebih luas. Stephen Haggard dan Steven Webb (1994), menjelaskan bahwa pemahaman demokrasi ekonomi mengarah pada perspektif bentuk pemerintahan atau peraturan oleh rakyat sendiri yang didasarkan atas lembaga-lembaga yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih secara bebas.

Pendapat yang lebih jauh lagi dijelaskan oleh Agus, M, Mazwan, Sosrokusumo (1983), demokrasi sosial atau ekonomi menitik beratkan pada persamaan hak dibidang sosial dan ekonomi.¹³ Hatta, (dalam Panji Patra, 2008) menjelaskan bahwa Prinsip ekonomi pada dasarnya lahir seiring dengan keberadaan negara hukum/negara kesejahteraan. Demokrasi politik merupakan syarat bagi berjalannya

demokrasi ekonomi. Pelaksanaan demokrasi ekonomi akan terwujud bila terdapat keseimbangan dan kesetaraan antara sistem politik dan sistem ekonomi.

Dalam sejarah perekonomian nasional semangat demokrasi ekonomi sering ditabrak dengan diarahkannya kebijakan sistem ekonomi nasional ke arah ekonomi kapitalistik dan atau ke sistem ekonomi terpusat.¹⁴ Sistem ekonomi kerakyatan yang bercirikan penegakan keadilan ekonomi dan pemihakan terhadap yang lemah merupakan landasan dan sekaligus sebagai sarana bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pilar utama demokrasi.

Pada tahun 1980-an negara-negara di Asia telah meninggalkan sistem otoriter dan menerapkan sistem demokrasi yang sekarang terus dalam proses kristalisasi. Bangsa Indonesia sejak awal telah memilih dan berkomitmen atas demokrasi. Saat sekarang ini Indonesia dalam tahap memelihara dan memperkuat demokrasi yang sedang berlangsung dan terus berkembang. Dalam pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaannya, cita-cita menjadi bangsa yang merdeka, tidak pernah terlepas dari pengakuan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan. Dengan demikian kemerdekaan dan demokrasi bagi bangsa Indonesia adalah konsep-konsep yang tidak dapat dipisahkan, yang satu merupakan unsur bagi yang lainnya.

Pandangan yang berikutnya adalah kesejahteraan yang berkeadilan, pada tahun awal negara muda ini dalam keadaan menghadapi ancaman dan serangan penjajahan serta pengkhianatan dari dalam, pemerintahan senantiasa diupayakan untuk diselenggarakan secara demokratis. Pada masa Orde Baru (orba) diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk menegakan kehidupan demokrasi yang konstitusional dan berdasarkan hukum. Artinya lembaga-lembaga dan mekanisme serta hubungan antar lembaga konstitusi itu diatur seperti yang dikehendaki oleh UUD 45 dan

ditetapkan oleh MPR dengan ketetapannya dan UU.

Dalam masa Orba pun demokrasi tidak berjalan sekali jadi, meskipun prinsip-prinsipnya telah ditetapkan sejak awal, namun penerapannya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan kemajuan dan kesiapan bangsa secara keseluruhan untuk melaksanakannya. Sejarah perkembangan ekonomi negara-negara berkembang menunjukkan ada kaitan erat antara sistem politik yang dianut dengan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Disebutkan juga bahwa sistem politik yakni demokrasi saja tidak memadai, harus didukung kebijaksanaan ekonomi yang tepat.

Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Ekonomi

Sistem ekonomi kerakyatan dikembangkan sejak tahun 1945 untuk melepaskan rakyat dari belenggu kapitalisme global abad ke-19 dan ke-20.¹⁵ Mengenai masalah demokrasi ekonomi, Hatta seringkali mengistilahkan demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Sebelumnya tidak dikenal istilah kedaulatan rakyat yang dalam bahasa belanda disebut *volkssoeveriniteit*.¹⁶ Penggunaan istilah kedaulatan rakyat oleh Hatta ini, bisa kita lihat dalam tulisannya;

“Pada waktu yang akhir ini seringkali orang salah mengartikan ‘kedaulatan rakyat’, sebab itu ada baiknya kalau saya disini berkata sepatah kata tentang kedaulatan rakyat itu. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat dengan secara mufakat. Kata mufakat mestilah ada, barulah kedaulatan itu ada pada rakyat. Putusan yang diambil oleh seorang atau satu golongan saja dengan tidak persetujuan rakyat, bukanlah kedaulatan rakyat. Demikian juga kata mufakat yang dipaksakan kepada rakyat”.¹⁷

Secara umum dalam wacana teori

ekonomi, istilah ekonomi kerakyatan memang tidak mendapatkan kajian khusus dan tidak masuk dalam bursa sebagai *grand ideology* yang begitu gencar diperbincangkan di skala nasional. Hal ini dikarenakan ekonomi kerakyatan merupakan sebuah refleksi dari sebuah realita sosial, bukan merupakan sebuah turunan dari mazhab-mazhab ekonomi tertentu.¹⁸ Gagasan ekonomi kerakyatan mencoba untuk merekonstruksi teori-teori dari ideologi kapitalis maupun sosialis yang dianggap gagal dalam mengentaskan persoalan ekonomi.

Istilah dan konsep ekonomi kerakyatan merupakan hasil buah pikir yang diperkenalkan oleh Muhammad Hatta. Ide itu ia tuangkan ke dalam kertas kerjanya yang berjudul "Ekonomi Rakyat dalam Bahaya" pada tahun 1934. Tulisan tersebut telah menjadi dasar konsep ekonomi kerakyatan sebagai tandingan atas sistem ekonomi Belanda yang didukung dan dibantu oleh kaum aristokrat dalam sistem feodalisme.¹⁹

Sistem ekonomi kerakyatan berbasis pada kekuatan rakyat, sedangkan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara swadaya untuk mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya. Inti dari politik ekonomi kerakyatan yang merupakan titik masuk untuk menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan menyangkut dua aspek yaitu aspek keadilan dan aspek demokrasi ekonomi yang berpihak pada ekonomi rakyat.

Pemikiran Hatta mencetuskan ide kedaulatan rakyat dan dikaitkannya dengan konsep ekonomi, merupakan sebuah nilai yang muncul dari seorang tokoh bangsa yang memiliki karakter yang kuat. Jika kita tilik dari biografi seorang Hatta dengan latar belakang daerah tempat Ia lahir dan besar, juga dari aspek keluarga yang membesarkannya, kuatnya perhatian Hatta terhadap isu-isu ekonomi memang menjadi dapat dipahami secara utuh dikarenakan Minang Kabau, seperti diungkapkan di awal merupakan daerah yang memiliki budaya

dan akar yang kuat dalam aspek ekonomi dan Islam, serta keluarga - bapak-ibu yang pengusaha - semakin mengukuhkan perhatiannya atas ekonomi.

Namun, semangat keberpihakan dan kepeduliannya atas rakyat miskin atau 'orang kecil' merupakan poin penting kuatnya karakter sosial dalam dirinya. Kekuatan itulah kemudian yang mendominasi pemikiran Hatta dalam memformulasi dan mencetuskan gagasan ekonomi kerakyatan. Penekanan atas ekonomi yang memiliki unsur keadilan, unsur keberpihakan kepada rakyat utamanya adalah rakyat kecil dan lemah.

Terbaca secara jelas bahwa pilihan sosialisme-nya Hatta tertuang dalam pemikiran dan sikap ekonomi yang dicetuskannya. Sehingga secara global dapat kita pahami, gagasan tersebut merupakan reaksi perlawanan atau penyeimbangan atas arus *mainstream* kapitalisme dan liberalisme pada saat itu.

Inilah yang menjadi kekuatan dan poin penting seorang pemimpin, ketika kita belajar dari sosok Hatta, dimana menyatunya pemahaman dan idiologi menjadi satu kesatuan atas pemikiran dan tindakan. Pemikiran itu melahirkan konsep usaha ekonomi kerakyatan yang disebut sebagai koperasi. Nilai dan semangat penting dari koperasi adalah kegotongroyongannya yang tetap berorientasi kepada keuntungan, namun keuntungan tersebut menjadi alat kesejahteraan bersama semua anggotanya. Dengan demikian dukungan Hatta sepenuhnya atas praktik bisnis koperasi karena koperasi paling ideal dalam lingkungan negara Pancasila.

Pemikiran Kontemporer Koperasi

Pribadi Hatta yang tidak hanya seorang pilitikus tetapi juga seorang cendekiawan yang tulen, terutama dibidang ekonomi dan hukum Tata Negara. Hal itu tidak lah mengherankan karena semasa Hatta kuliah, ia mengambil jurusan di bidang tersebut. Dalam bidang ekonomi, Hatta

mengeluarkan gagasan mengenai penerapan demokrasi tidak hanya dibidang politik saja, seperti yang diterapkan oleh negara-negara barat.²⁰ Tetapi juga demokrasi ekonomi, dimana kekayaan suatu negeri yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, tambang tidak dikuasai oleh orang – perorangan atau golongan tertentu, tetapi dikuasai oleh negara guna sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Konsep koperasi merupakan bukti keprihatinan Muhammad Hatta akan kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia dan koperasi ditawarkan guna menunjukkan semangat kolektivitas dan gotong royong serta tolong menolong. Kedua spirit ini menjadi dasar dari budaya bangsa Indonesia. Koperasi kemudian diakui dan diterima sebagai salah satu bentuk badan usaha dalam sistem ekonomi kerakyatan.^{21,22}

Junaidi, Hindi. 2011. Studi terhadap

Konsep awal koperasi yang dibawa oleh Hatta sangat sesuai dengan sistem ekonomi syariah, walaupun dalam perjalanannya banyak terjadi perubahan sistem hingga saat sekarang ini. Koperasi merupakan sebuah usaha bersama dari setiap anggota koperasi yang dioperasikan oleh orang seorang berdasarkan asas kekeluargaan. Wujud dari koperasi adalah sebuah usaha bersama sebagai bentuk dari persaudaraan karena berdasarkan asas kekeluargaan. Usaha bersama yang dilakukan bukan merupakan keuntungan satu pihak saja. Prinsip kebersamaan yang diutamakan. Keuntungan dan kerugian pun akan ditanggung bersama.²²

Dalam studi ini, penulis tidak dapat untuk memberikan data terkini dan terbaru mengenai jumlah koperasi yang terdaftar dan aktif hingga tahun 2018 di Indonesia. Namun, mengamati dan mencermati praktik bisnis dan ekonomi masyarakat khususnya lapangan-lapangan bisnis masyarakat dalam bentuk koperasi dan usaha kecil-tradisional terlihat tergerus dan terpinggirkan oleh operasi bisnis gerai waralaba.

Mudahnya didapatkan gerai waralaba atau toko-toko modern, semakin memanjakan konsumen dengan segala kemudahan yang didapatkan. Sehingga, kondisi seperti ini, tidak hanya dapat berpotensi menghilangkan koperasi dari diksi dan narasi perekonomian kita, namun juga memiliki potensi yang cukup besar untuk mematikan koperasi dalam praktik bisnis keseharian masyarakat Indonesia, selain itu pasar-pasar tradisional dan toko-toko masyarakat kecil juga memiliki ruang gerak bisnis yang lebih sempit.

Praktik bisnis pasar bebas, dimana minimalnya proteksi atau perlindungan pemerintah atas toko-toko masyarakat kecil untuk bersaing dengan toko-toko modern yang memiliki penataan yang cukup rapi dan yang tidak kalah pentingnya didukung oleh sistem dan modal yang cukup baik, maka tidak dapat untuk dipungkiri serta dihindari potensi untuk menggerus koperasi, usaha kecil dan tradisional cukup tinggi.

Keberpihakan dalam bentuk regulasi dan pengawasan yang ketat untuk menciptakan sistem berusaha yang adil antara koperasi, usaha kecil-tradisional dan gerai-gerai besar serta modern menjadi teramat sangat dibutuhkan dan penting jika bangsa ini, ingin melihat spirit perekonomian gotong-royong yang ada di dalam koperasi masih ada.

Kesimpulan

Lahir dan besar di Minang Kabau dengan tradisi ekonomi dan Islam yang kuat merupakan modal awal pembentuk sikap mental serta ketertarikan tersendiri Hatta kepada Ekonomi. Ditambah dengan kesempatan yang ia dapatkan untuk menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Bersekolah di MULO (tahun 1917) dan sekolah di PHS Jakarta pada tahun 1919 dan berhasil diselesaikan pada tahun 1921. Namun tidak kalah pentingnya, kemampuan dan kemahirannya berorganisasi tertaptri awal sekali ketika Hatta kemudian bergabung di organisasi JSB.

Karir organisasinya kemudian semakin meningkat setelah bergabung di Indische Vereeniging yang berubah menjadi Perhimpunan Indonesia (PI).

Hatta menikmati dialektika pemikiran ekonomi yang terjadi di eranya, *shifting* antara satu paradigma ekonomi ke paradigma lainnya memberikannya horizon memilih dan berpikir lebih luas dalam menentukan pilihan idiologi berpikirnya. Pilihan Hatta atas sosialisme sesungguhnya tidak semata-mata merupakan pengaruh dari sosialisme itu sendiri, namun ia menemukan banyak kesesuaian dengan tradisi tanah lahirnya yakni Minang Kabau, Islam. Agama Islam memberikan kontribusi kuat dalam pemikiran sosial dan ekonomi Hatta diantaranya adalah demokrasi Ekonomi.

Demokrasi ekonomi yang dimaksud oleh Hatta, secara langsung adalah demokrasi dengan kedaulatan rakyat pada bidang ekonomi salah satunya. ekonomi kerakyatan memang bukan *grand ideology* dikarenakan ekonomi kerakyatan merupakan sebuah refleksi dari sebuah realita sosial, bukan merupakan sebuah turunan dari paradigma-paradigma ekonomi dunia. Gagasan ini hanya mencoba untuk merekonstruksi teori-teori dari ideologi kapitalis maupun sosialis yang dianggap telah gagal.

Koperasi bukti keprihatinan Muhammad Hatta akan kondisi ekonomi masyarakat. Semangat kolektivitas dan gotong royong serta tolong menolong menjadi ruh utama koperasi yang diambil dari budaya bangsa Indonesia. Sekarang koperasi dan usaha kecil menengah secara umum terancam tergerus oleh pertarungan praktik ekonomi liberal diantaranya toko-toko waralaba atau modern yang menjamur di setiap ruas dan sudut jalan di kota maupun kabupaten di Indonesia. Ketika memang tidak ada keberpihakan yang nyata pemerintah dalam menjaga dan memperkuat koperasi dan usaha kecil lainnya, maka semangat utama gotong-royong dalam praktik koperasi dapat dipastikan akan punah.

(Footnotes)

- ¹ Mohammad Hatta, 1979, *Memoir*, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, hlm. 1
 - ² Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin Ekonomi dan Islam Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dharma Bakti Wakaf, hlm. 1
 - ³ Mubiyarto, 2001, *Ekonomi Kerakyatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Media Indonesia, hlm. 55
 - ⁵ Deliar Noer, 2018, *Biografi Politik Mohammad Hatta Jilid 1 : Mohammad Hatta dan Pemikirannya*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
 - ⁴ Lihat Adi Sasono, *Prospek dan Posisi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, dalam Baihaqi Abdul Madjid dan Saifudin A. Rashid (ed), *Paradigm Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, Jakarta: PT. Pinbuk 2000 hlm. 26
- Sebagai catatan krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998 UKM telah berhasil selamat dari krisis moneter dikarenakan pemanfaatan atas produk lokal secara maksimal sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dengan barang atau bahan baku impor.
- ⁶ Ibid, Hlm.2
 - ⁷ Ibid
 - ⁸ Panji Patra, 2008, *Pemikiran Ekonomi Muhammad Hatta*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah
 - ⁹ William I Resse, 1998, *Dictionary of Philosophy and Religion, Eastern and Western Thought*, Newyork : Jurnal panji Humanity Books, Hlm. 713
 - ¹⁰ Panji Patra, 2008, *Pemikiran Ekonomi Muhammad Hatta*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, hlm115
 - ¹¹ Ibid
 - ¹² Ibid
 - ¹³ Agus M. Mazwan Sosrokusumo, 1983, *Fries Emessen*, Depdikbud, Universitas Jember.
 - ¹⁴ Swasono, S. E. 1985. *Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi: membangun sistem ekonomi nasional*. Penerbit Universitas Indonesia.
 - ¹⁵ Fariz Rahman, 2016, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Jember
 - ¹⁶ I, wansa wijaya, 2002, *Mengenag Bung Hatta*, Cetakan kedua, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, hlm 36
 - ¹⁷ Muhhamad hatta, 2002, *Kumpulan Pidato 1*, Jakarta PT. Toko Gunung Agung, hlm 63-64
 - ¹⁸ Fariz Rahman, 2016, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Jember
 - ¹⁹ Ibid
 - ²⁰ Mohammad Hatta, 1980, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: UI Press Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
 - ²² Hatta, Mohammad. 1958. *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Bank*. Jakarta: Balai Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman, 1995, *Doktrin ekonomi dan Islam* jilid 1. Yogyakarta : PT. Dharma Bakti Wakaf
- Agus M.Mazwan Sosrokusumo, 1983, *Fries Emessen*, Depdikbud, Universitas Jember
- Deliar Noer, 2018, *Biografi Politik Mohammad Hatta Jilid 1 : Mohammad Hatta dan Pemikirannya*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara
- Fariz Rahman, 2016, *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Jember
- Hatta, Mohammad. 1958. *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Keekonomi dan Bank*. Jakarta: Balai Pustaka.
- I wangsa wijaya, 2002, *Mengenag Bung Hatta*, Cetakan kedua, Jakarta : PT.Toko Gunung Agung
- Junaidi, Hindi. 2011. Studi terhadap Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan
- Mohammad Hatta, 1979, *Memoir*, Jakarta : PT. Tintamas Indonesia
- Mohammad Hatta, 1980, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: UI Press
- Mubiyarto, 2001, *ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional.*” Media Indonesia
- Muhammad Hatta, 2002, *Kumpulan Pidato 1*, Jakarta PT.Toko Gunung Agung, hlm 63-64
- Panji Patra, 2008, *Pemikiran Ekonomi Muhammad Hatta*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah
- Swasono, S. E. 1985. *Sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi: membangun sistem ekonomi nasional*. Penerbit Universitas Indonesia. Syarif Kasim, Riau.
- William I Resse, 1998, *Dictionary of Philosophy and Religion, Eastern and Western Thought*, Newyork : Jurnal panji Humanity Books

Journal:

- Hikmawan, M. D. (2017). Pluralisme Politik Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223-247.
- Lee, K. (2004). Reading and learning strategies: recommendations for the 21st century. *Journal of Developmental Education*, 28(2), 2-15.

Journal article with DOI:

- Kusumaningrum, D. (2016). Interdependence versus truth and justice: lessons from reconciliation processes in Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(1), 15. doi: 10.22146/jsp.17998.

Book:

- Heywood, Andrew. (2014). *Politik*. Penerjemah: Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hakim, L. (2015). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Gramasurya.
- Bauman, Zygmunt. (1998), *Modernity and Ambivalence*. Cambridge: Polity Press

Book chapter:

Smith, F. M., & Jones, W. (2004). The college student. In C. Wood & M. Meyer (Eds.), *Cross-cultural education* (pp. 75-105). London, Canada: MacMillan

Journal article on website:

Austin, D. (2009). Fatty acids, breastfeeding and autism spectrum disorder. *E-journal of Applied Psychology*, 5(1), 49-52. Retrieved from <http://ojs/lib.swin.edu.au/>

Newspaper article:

Fung, M. (2006, December 12). Asthma rates are increasing. *Winnipeg Free Press*, pp. C4.

Newspaper article on website:

Harris, M. (2011, August 16). Grades improve if classes start later, studies find. *The Calgary Herald*. Retrieved from <http://www.calgaryherald.com/>

Website:

Buzan T. (2007). Mind maps. September http://www.buzanworld.com/Mind_Maps.html.

Website document:

TransCanada. (2006). Annual report. http://www.transcanada.com/investor/annual_reports/2006/media/pdf/TransCanada_2006_Annual_Report.pdf

Book translation:

Mancusa, S., & Viola, A. (2015). *Brilliant green: the surprising history and science of plant intelligence* (J. Benham, Trans.). Washington, DC: Island Press.

Conference Proceeding:

Fang, Q., Zhao, F., & Guibas, L. (2003). Lightweight sensing and communication protocols for target enumeration and aggregation. In M. Gerla, A. Ephremides, & M. Srivastava (Eds.), *MobiHoc '03 fourth ACM symposium on mobile ad hoc networking and computing* (pp. 165–176). New York, NY: ACM Press.

HandBook:

Greisler, David S, Stupak, Ronald J (2007). *Handbook of Technology Management in Public Administration*. New York: CRC Taylor and Francis.